



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DIMENSI-DIMENSI OTONOMI DAERAH

Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa
Doddy S. Singgih

Paradigma Kualitas dalam Manajemen Publik
Falih Suaedi

**Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah:
Kasus Kabupaten Blitar**
Bagong Suyanto

Desentralisasi dan Pembangunan: Sebuah Perdebatan
Kacung Marijan

**Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga:
Studi Komunitas di Desa Tunggur Jagir, Kec. Mantup, Kab. Lamongan**
Benny Soembodo

**Resistensi Terhadap Perubahan pada Masyarakat Pulau Madura
dan Kepulauannya**
Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan

**Ekowisata Sebagai Alternatif Pengembangan Potensi Daerah
di Era Otonomi**
Sri Endah Nurhidayati

**Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil
di Indonesia di Era Otonomi Daerah**
Roestoto Hartojoputro

**Resensi Buku:
Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan,
Strategi dan Peluang**
Karnaji

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015; Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Meskipun tema utama Dimensi-Dimensi Otonomi Daerah merupakan tema yang seringkali dibahas, dan coba diimplementasikan di berbagai kota maupun kabupaten. Namun, tidak sedikit perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi apa dan bagaimana otonomi daerah itu terkesan berlebihan. Bagi kota atau kabupaten yang kaya baik sumber alam dan potensi daerah, dengan adanya otonomi, mengeruk keuntungan secara ekonomis bagi kebutuhan daerah merupakan target utama, setelah beberapa tahun semenjak orde baru menjadi "penonton" pembangunan dan rela menjadi "sapi perah" bagi pemerintah pusat, bahkan ada beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat sebagai bentuk *euphoria* semenjak dibukanya keran otonomi. Sementara bagi daerah minus baik sumber dan potensi daerah pemberlakuan otonomi merupakan pukulan yang cukup berat, terutama dalam hal pengaturan perimbangan keuangan dan kekuasaan.

Untuk menelaah lebih jauh, jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* edisi Nomor 2 (April) 2004 sengaja mengupas permasalahan Otonomi Daerah berikut dimensi-dimensinya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Berikut beberapa tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini: Analisis mengenai perdebatan otonomi seperti tulisan Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa disajikan oleh Doddy S. Singgih. Dalam hal manajemen kupasan Falih Suaedi tentang Paradigma Kualitas dalam Manajemen Publik patut menjadi bahan pertimbangan. Contoh hasil implementasi otonomi dalam tulisan Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Blitar oleh Bagong Suyanto. Desentralisasi dan Pembangunan: Sebuah Perdebatan dijelaskan Kacung Marijan. Benny Soembodo mengetengahkan Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga. Dari kacamata psikologi Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan mencoba memberikan pendapatnya dalam Resistensi terhadap Perubahan pada Masyarakat Pulau Madura dan Kepulauannya. Telaah pariwisata dalam otonomi dijelaskan secara panjang lebar oleh Sri Endah Nurhidayati yaitu Ekowisata sebagai Alternatif Pengembangan Potensi Daerah di Era Otonomi, serta Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil di Indonesia di Era Otonomi Daerah disajikan oleh Roestoto Hartojoputro. Tak kalah pentingnya bahan resensi buku: Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang diuraikan oleh Karnaji

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat yang sedang berkembang.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 3 (Juli) 2004:
Indonesia Memasuki Pemilu Putaran I

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa

Doddy S. Singgih

1

Paradigma Kualitas dalam Manajemen Publik

Falih Suaedi

13

Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah:

Kasus Kabupaten Blitar

Bagong Suyanto

25

Desentralisasi dan Pembangunan: Sebuah Perdebatan

Kacung Marijan

45

Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga: Studi Komunitas di Desa Tunggun Jagir, Kec. Mantup, Kab. Lamongan

Benny Soembodo

59

Resistensi Terhadap Perubahan pada Masyarakat Pulau Madura dan Kepulauannya

Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan

69

**Ekowisata Sebagai Alternatif Pengembangan Potensi Daerah
di Era Otonomi**

Sri Endah Nurhidayati

81

**Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil
di Indonesia di Era Otonomi Daerah**

Roestoto Hartojoputro

95

Resensi Buku:

**Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan,
Strategi dan Peluang**

Karnaji

105

PERSEPSI MASYARAKAT PETANI MISKIN MENGENAI KESEJAHTERAAN KELUARGA *

Studi Komunitas di Desa Tunggun Jagir, Kec. Mantup,
Kab. Lamongan

Benny Soembodo

Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair

Abstract

Family welfare is a subjective concept, as there is a difference between individual typical objective conditions and surrounding values. Therefore, a more detail information on geographical and the local socio-cultural condition of poor farmer society's welfare is needed. The concept of prosperity to Javanese society is refer to a physical condition to be reached based on things that are considered as the most valuable in their life. They are: drajat (position), prosperity and cleverness. The effort to get those physical condition must be based on Javanese cultural values, in order to get a happiness; rahayu (health physically), slamet (safe feeling) and tenteram (secure).

Keywords: perception, farmer, poverty, welfare, family

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peran dan/atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi

ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah fungsi reproduktif — yang dari generasi ke generasi terus-menerus mengulangi fungsi yang sama — kemudian telah berkembang ke fungsi sosial-budaya, namun belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur, yaitu sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomis-produktif (Achir : 1994).

* Dibiayai oleh P2IPT Ditjen Dikti Depdiknas.

Lebih jauh menurut Agoes Achir, keluarga mempunyai delapan fungsi yaitu : (1) fungsi keagamaan, yang mendorong dikembangkannya keluarga dan anggota-anggotanya menjadi insan yang agamis; (2) fungsi sosial-budaya; (3) fungsi cinta kasih, untuk memberi landasan yang kokoh untuk hubungan anak dengan orang tuanya sehingga keluarga tersebut menjadi tempat atau wadah yang pertama atau utama di mana semuanya bisa mendapatkan kehidupan yang penuh cinta kasih; (4) fungsi perlindungan, yang menumbuhkan rasa aman dan kehangatan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan yang memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik anak agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan; (7) fungsi ekonomi yang menjadi unsur pendukung kemampuan kemandirian keluarga dan anggotanya; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Apabila fungsi-fungsi keluarga dijalankan secara baik oleh keluarga, maka kesejahteraan keluarganya akan terjamin.

Fungsi-fungsi di atas, pada dasarnya, perlu dilaksanakan oleh setiap keluarga di Indonesia. Apabila ditujukan utamanya ke keluarga-keluarga yang belum sejahtera (Pra Sejahtera), sejauh tertentu diharapkan dapat mendorong keluarga untuk mengentaskan dirinya dari ketertinggalannya. Bagi keluarga-keluarga lain yang beruntung telah mencapai kesejahteraan, tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsi tersebut tetap penting. Tujuannya adalah agar kesejahteraan keluarga tidak mengalami kemunduran dan agar kualitas keluarga terus meningkat. Di sinilah, dapat ditemukan adanya kaitan antara keluarga

sebagai suatu institusi sosial dengan keluarga sebagai institusi ekonomi.

Diakui atau tidak, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Kendala-kendala untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, lebih banyak mempunyai muatan kualitatif akan senantiasa muncul, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal institusi keluarga itu sendiri. Adanya keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada individu anggota keluarga dalam berbagai dimensinya, serta semakin kecilnya akses dan kemampuan untuk menguasai sumber daya yang ada di lingkungannya, merupakan faktor-faktor yang harus turut diperhitungkan. Kondisi geografis, sosial dan kultural yang melingkupi kehidupan keluarga di mana keluarga itu tinggal, sangat berpengaruh terhadap penilaiannya mengenai kesejahteraan keluarga.

Apa yang telah diungkapkan di atas, sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan keluarga di wilayah pedesaan, pada dasarnya akan menimbulkan banyak hal yang menarik untuk disimak. Perlu disadari bahwa, mungkin telah banyak dilakukan studi kelayakan yang mendalam dan sistematis mengenai kriteria kesejahteraan keluarga dan faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa kriteria kesejahteraan keluarga untuk satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Oleh karena itu, permasalahan yang diajukan guna memperoleh pemahaman tersebut di atas, adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat petani miskin mengenai kesejahteraan keluarga?

2. Aspek-aspek apa yang menjadi determinan terhadap persepsi tersebut?

Kemiskinan atau Pra Sejahtera?

Sampai saat ini dapat dikemukakan bahwa, secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang miskin telah sangat berkurang. Seperti diketahui bahwa, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1990 masih berjumlah 27,2 juta orang (di kota dan desa). Jumlah itu merupakan 15,1% dari seluruh penduduk Indonesia. Adapun jumlah desa miskin di Indonesia menurut keadaan Juni 1993, adalah 20.633 desa (31,47%). Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan, memang dapat dikatakan sebagai suatu prestasi. Namun, secara kualitas masih perlu dipertanyakan, apakah penurunan persentase ini telah benar-benar mengangkat penduduk yang miskin menuju kesejahteraan yang layak.

Adapun berdasarkan data BKKBN tahun 1995, sebanyak 40,32% dari seluruh jumlah keluarga yang ada di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk dalam kelompok Keluarga Pra Sejahtera maupun Keluarga Sejahtera I yang diidentifikasi sebagai keluarga miskin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18,25% secara ekonomi (pendapatannya) tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, sehingga oleh BKKBN dimasukkan dalam kategori keluarga termiskin dari keluarga sejahtera.

Pendekatan struktural fungsional memandang keluarga sebagai group kecil yang memiliki ciri tertentu (struktur dan fungsi) untuk memelihara kelangsungan hidup. Pendekatan antropologi

memandang keluarga memiliki arti yang berbeda sesuai adat-istiadat setempat. Secara umum, memiliki ciri relatif sama: terbentuk dari ikatan perkawinan yang diakui masyarakat, darah dan adopsi sesuai adat, merupakan unit orang yang berinteraksi, diidentifikasi sebagai sistem penamaan kekerabatan (Geertz: 1985).

Dari pemahaman mengenai keluarga di atas, maka dalam kaitannya dengan kesejahteraan, unit sosial keluarga merupakan kesatuan sosial budaya. Dengan demikian, proses interaksi sosial (jaringan sosial) di antara anggota keluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah) merupakan hal terpenting, karena merupakan saluran sosialisasi nilai-nilai kesejahteraan yang direfleksikan melalui upacara, pertukaran (komunikasi) cerita pengalaman hidup. Bahkan, jaringan sosial ini dapat meluas sampai tingkatan kerabat luas dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup keluarganya. Selain dipandang sebagai atribut (identitas), kesejahteraan juga harus dipandang sebagai proses yang menyangkut bentuk interaksi sosial dan perilaku terpola dalam upaya mencapai kesejahteraan. Di dalam wadah keluarga, penting untuk mengkaji pembagian kerja dan fungsi (peran) yang terorganisasi berdasarkan status setiap anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak) (Sumarti: 2000).

Menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga

standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsep tersebut di atas mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga. Mengingat kesejahteraan keluarga sifatnya kondisional, tentu perlu adanya ukuran-ukuran dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, ada indikator-indikator minimal yang harus dicapai oleh setiap keluarga. Dengan demikian, sebuah keluarga yang dapat memenuhi indikator-indikator yang ada, maka keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang sejahtera.

Dari tahapan-tahapan Keluarga Sejahtera yang ada, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, kemudian digolongkan ke dalam keluarga miskin. Namun, kemiskinan di sini bukan semata karena faktor ekonomi, namun juga karena faktor non-ekonomi, seperti masih ada anggota keluarga yang buta huruf, tidak atau belum menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keluarga miskin menurut pengertian keluarga sejahtera berarti miskin karena faktor ekonomi dan miskin karena faktor non-ekonomi. (Tjiptoherijanto: 1997).

Konsep kesejahteraan keluarga bagi masyarakat desa tentu tidak senantiasa bertumpu pada satu aspek saja, namun dapat pula bermuara pada akumulasi banyak aspek. Artinya, satu keluarga mungkin secara subyektif mengidentifikasi diri atau menjabarkan konsep kesejahteraan keluarga hanya bila segala kebutuhan ekonomik terpenuhi. Namun, keluarga lain tidak sekedar

kebutuhan ekonomik saja terpenuhi, melainkan harus hadir pula aspek lain, seperti aspek kesehatan. Dengan demikian, terciptanya kesejahteraan bagi sebuah keluarga tidak akan terlepas dari berbagai macam aspek yang mempengaruhinya. Aspek-aspek yang cukup dekat dengan kehidupan keluarga dan berpengaruh terhadap persepsi mengenai konsep kesejahteraan keluarga itu sendiri, antara lain adalah aspek ekonomi dan aspek sosial-budaya.

Di dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, orang Jawa tidak memisahkan kesejahteraan fisik (materi) dengan kesejahteraan batin (non-materi), karena hidup orang Jawa merupakan suatu pengalaman religius. Di dalam menjalani statusnya dan untuk mencapai derajat, harta benda, dan kepandaian dalam kehidupan, haruslah menumbuhkan rasa tenteram (kebahagiaan hati). Dengan demikian, kesejahteraan, baik materi maupun non-materi, dapat dicapai bila orang Jawa mampu menjalankan perannya sesuai statusnya. Rasa tenteram itu sendiri memiliki 3 (tiga) gradasi, yaitu: rasa sehat (rahayu) sebagai individu, rasa aman (slamet) sebagai makhluk sosial, dan rasa ayem (tenteram) sebagai makhluk dalam hubungan dengan alam halus (Tuhan).

Persepsi dapat diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap obyek atau peristiwa sosial yang diamati (Trenholm, 1995). Jika kesejahteraan merupakan hasil dari proses pembelajaran manusia dalam hidupnya, maka persepsi tentang kesejahteraan tersebut akan terbentuk melalui pengalaman hidup manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya (keluarga, kelompok dan masyarakat) dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan itu sendiri adalah,

wujud kebudayaan dan persepsi mengenai kesejahteraan terbentuk melalui proses interaksi sosial dari perwujudan kesejahteraan tersebut. Sebaliknya, persepsi yang terbentuk tersebut pada akhirnya mempengaruhi perilaku dalam proses perwujudan kesejahteraan. Persepsi kesejahteraan merupakan hasil konstruksi sosial. Perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja, akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda.

Analisis Kasus

Kondisi kesejahteraan menurut masyarakat petani miskin desa Tunggur Jagir, salah satu pedesaan di kabupaten Lamongan, haruslah dijelaskan melalui pemahaman tentang pandangan hidup masyarakat Jawa. Javanisme memandang kehidupan manusia selalu tidak dapat dipisahkan dari kosmos alam raya, dengan demikian hidup manusia itu merupakan pengalaman religius dan wajib menjaga keselarasan dengan tata tertib masyarakat. Kemasyarakatan merupakan sumber kebahagiaan dan penghargaan, lepas dari obyektivitas dan individualitas. Konsekuensi dari manusia Jawa sebagai makhluk sosial adalah tujuan material dan keselamatan dapat dicapai dalam rangka sosial melalui hubungan baik dengan atasan. Di dalam pandangan petani, keselamatan orang Jawa tergantung apakah menemukan tempat yang tepat dalam keselarasan lingkungannya, yang dilakukan dengan prinsip rukun dan hormat dalam interaksi (Suseno: 1987). Implikasi dari konsep tersebut adalah bahwa, tidak mungkin memisahkan kesejahteraan materi dan non-materi, sedangkan kesejahteraan non-materi merupakan

wujud kelakuan yang bagi petani (*wong cilik*) wujud kelakuan tersebut adalah pengalaman slamet, tenteram batin, tiada ancaman konflik dan kekacauan.

Keselarasan adalah persepsi manusia tentang keteraturan hubungan antara unsur-unsur yang menghuni alam. Keselarasan diterima manusia sebagai kebutuhan rokhani dan kebutuhan pragmatis. Sebagai kebutuhan rokhani, keselarasan dipandang sebagai pegangan utama dalam menjamin ketentraman batin serta pemahaman seseorang akan tempatnya di tengah jagad. Keselarasan sebagai kebutuhan pragmatis, dipandang sebagai syarat untuk hidup tenang dalam hidup bermasyarakat. Keselarasan dianggap akan mencegah konflik serta menjamin kerukunan antara sesama unsur yang menyangga jagad. Terhadap sesama anggota masyarakat, usaha menjaga keselarasan itu terjabarkan dalam sistem nilai yang sangat menekankan pada hubungan yang sejauh mungkin menghindari konflik, pada penajaman naluri untuk mau terus berada dalam kebersamaan dan saling membantu dalam pekerjaan (Kayam: 1987).

Orang Jawa yang dididik untuk selalu menghindari konflik (karena konflik akan merusak hubungan yang *laras*), akan selalu berusaha menjaga agar dalam berhubungan dengan sesama manusia untuk selalu bersikap *jatmika*, yang secara bebas diterjemahkan sebagai simpatik, menarik, ramah. Oleh karena itu, bersikap *jatmika* akan lebih dahulu diutamakan. Nilai *jatmika* berfungsi untuk merambah jalan menuju pada kondisi *laras*. Sikap *jatmika* adalah semacam teknik yang memungkinkan keselarasan selalu dapat terjaga. Keselarasan atau keadaan *laras* pada orang Jawa, sangat

dekat dengan nilai lain yang juga penting, yaitu nilai *rukun*. Sebagai suatu masyarakat pertanian yang sangat percaya kepada keutuhan dan keseimbangan jagad dan khawatir akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendatangkan gangguan pada keseimbangan serta keselarasan hubungan antara unsur-unsur kosmos, maka keadaan *rukun* yakni keadaan damai, bersatu, bersama, *ora padudon* (tidak bertengkar) antara para anggota masyarakat, nyaris merupakan obsesi masyarakat pedesaan Jawa (Suseno: 1984).

Sesuai dengan prinsip *laras*, pendidikan itu selalu menekankan agar antar saudara tidak *congkrah* (bertengkar), selalu dapat saling menenggang rasa, bersikap murah hati terhadap anggota keluarga yang lain. Demikian juga terhadap tetangga dan anggota jaringan keluarga dalam desa, prinsip *rukun* itu ditekankan karena hanya dengan begitu suasana kebersamaan, suasana hangat dalam komunitas dapat dipertahankan. Pameo Jawa, "*mangan ora mangan waton kumpul*", menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai *rukun* itu merupakan nilai yang sudah kuat berakar. Kekuatan akar nilai tersebut, juga menunjukkan bagaimana orang Jawa sangat dekat, erat dan merasa *kepenak* berada dalam kebersamaan komunitas. Dengan demikian, nilai *rukun* itu sangat konsisten menyangga nilai keselarasan, karena dengan membangun kondisi *rukun* (bersama dengan nilai-nilai lain, seperti *jatmika* dan *hurmat*), jaminan akan pelestarian keselarasan itu diharapkan akan selalu terjamin Artinya, dengan membangun nilai-nilai *rukun*, *jatmika*, dan *hurmat*, maka hidup rukun bertetangga atau hidup rukun dalam

bermasyarakat dapat tercapai (Kayam: 1987).

Pandangan Jawa tidak memisahkan kesejahteraan fisik (materi) dengan kesejahteraan batin (non-materi), karena hidup orang Jawa merupakan suatu pengalaman religius. Di dalam menjalani statusnya dan mencapai drajat, harta benda dan kepandaian dalam kehidupan, haruslah menumbuhkan rasa tenteram (kebahagiaan hati). Hal ini dapat dicapai bila orang Jawa dapat menjalankan perannya sesuai dengan statusnya. Rasa tenteram itu sendiri memiliki tiga gradasi: rasa sehat (*rahayu*) sebagai individu, rasa aman (*slamet*) sebagai makhluk sosial, dan rasa ayem (*tenteram*) sebagai makhluk dalam hubungannya dengan alam halus (Tuhan) (Suseno: 1987).

Pada masyarakat pedesaan tradisional Jawa, sistem orientasi nilai budaya mempunyai arti yang lebih besar dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini karena, orang Jawa pada umumnya di dalam pembicaraan sehari-hari sering mengkait-kaitkan setiap kejadian dan peristiwa di sekelilingnya dengan ungkapan-ungkapan moral dan budi pekerti, dan seringkali menggunakan peribahasa dalam pembicaraannya. Berkaitan dengan sistem orientasi nilai budaya Jawa tersebut, Koentjaraningrat (1994) mencoba menjelaskan dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh C dan F Kluckhohn, yang secara universal membagi nilai-nilai budaya ke dalam lima kategori berdasarkan lima masalah terpenting di dalam kehidupan manusia, yaitu: (1) masalah universal mengenai hakekat hidup; (2) masalah universal mengenai hakekat dari kerja serta usaha manusia; (3) masalah universal mengenai hubungan

antara manusia dan alam; (4) persepsi manusia tentang waktu; dan (5) masalah universal mengenai hubungan antara manusia dan sesamanya.

Kemudian, bagaimana orientasi nilai budaya masyarakat petani miskin di desa Tunggur Jagir sendiri akibat adanya proses modernisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan melalui *focus group discussion* diperoleh gambaran bahwa, masyarakat petani miskin setempat masih memegang orientasi nilai budaya Jawa yang tradisional karena pengaruh dari kondisi geografis desa yang kurang menguntungkan. Kenyataan tersebut, dapat dilihat mengenai bagaimana persepsi masyarakat petani miskin mengenai konsep kesejahteraan keluarga.

Di dalam masalah mengenai hakekat hidup, oleh karena kondisi geografis desa yang kurang menguntungkan, di mana lahan garapan (sawah) pada musim kemarau tidak selalu mendapatkan air irigasi teknis dari air sendang (pada musim kemarau dilakukan sistem pengairan bergilir pada sawah-sawah milik petani, karena air sendang juga dibutuhkan oleh desa lain yang letaknya di bawah desa Tunggur Jagir). Oleh karena itu, pada musim kemarau hanya tanaman palawija (jagung) saja yang banyak ditanam oleh petani. Dengan kondisi ini, petani miskin hanya menerima keadaan dalam hidupnya, hanya dapat menanam jagung saja.

Keadaan yang demikian, sering diungkapkan oleh petani miskin lokal dengan peribahasa atau ungkapan "*tiyang punika ingkang kedah nrimah*".

Mengenai hakekat karya, petani miskin lokal hanya dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari. Petani miskin tidak berani berspekulasi apakah hasil tanamannya akan memberi panen yang berlebih, terutama pada musim kemarau. Petani miskin hanya mampu mengendalikan diri dan tidak *ngaya* di dalam bertani. Kemudian di dalam hubungannya dengan alam, karena kondisi geografis desa yang kurang menguntungkan, petani miskin hanya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Petani miskin hanya menanam palawija (jagung) pada lahan garapannya daripada menanam padi, walaupun lahan garapannya mendapatkan air irigasi. Selain itu, memelihara lingkungan fisik, baik lingkungan rumahnya maupun desanya, agar ketidakeimbangan hubungan antara petani dengan alam yang dapat menimbulkan keresahan yang berupa kerawanan alam dan ketandusannya dapat dihindarkan. Itulah salah satu cara yang dilakukan oleh petani miskin lokal untuk menjaga keharmonisan dengan alam, agar kebutuhan hidup manusia tetap dapat terpenuhi.

Perubahan komunitas desa Tunggur Jagir akibat adanya proses modernisasi, ditandai dengan adanya perubahan hubungan antara petani dan lingkungan sosial. Perubahan hubungan tersebut dimulai ketika proses modernisasi yang dicirikan dengan komersialisasi pertanian (serba uang) dan pendidikan, telah mengubah perilaku petani. Perubahan perilaku petani dapat dilihat dalam hal: (1) orientasi pendidikan sebagai jalan untuk memperoleh kedudukan (drajat); (2) diferensiasi pekerjaan sebagai tuntutan kebutuhan materi; dan (3) perkembangan kelembagaan sosial sebagai tuntutan kebutuhan rahayu dan rasa aman. Walaupun telah terjadi

komersialisasi pertanian yang "serba uang", akan tetapi tidak mendorong petani di desa Tunggun Jagir untuk mementingkan kebendaan, sehingga perilaku untuk memenuhi kebutuhan slamet dan tenteram tidak berubah. Kesenangan batin tetap terpenuhi melalui keguyuban bersama. Demikian pula halnya dengan hubungan antara petani dan lingkungan alam, tidak berubah meskipun telah terjadi proses modernisasi pertanian. Petani maju yang memiliki dan menguasai lahan, modal (uang) serta tenaga kerja, tetap menjadikan kegiatan petani sebagai bagian yang selaras dengan kehidupan alam. Dengan demikian, hubungan antara petani dengan alam tetap seimbang, sehingga tidak muncul kerawanan alam dan ketandusannya, dan tidak menimbulkan keresahan (ketidaktenteraman) pada masyarakat desa.

Seperti apa yang dikatakan Bintarto (1977), unsur-unsur desa meliputi: a) daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak serta penggunaannya ; b) penduduk, termasuk di sini adalah mata pencaharian penduduk desa setempat, dan c) tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Daerah menyediakan kemungkinan hidup, penduduk menggunakan kemungkinan yang disediakan oleh daerah itu guna mempertahankan hidup. Tata kehidupan, dalam artian yang baik memberikan jaminan akan ketentraman dan keserasian hidup bersama di desa. Dengan demikian, maju-mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human efforts*) dan tata geografi (*geo-*

graphical setting). Masyarakat merupakan suatu *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong-royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti, karena penduduk desa merupakan *face to face group* di mana masyarakat desa saling mengenal seolah-olah mengenal dirinya sendiri. Faktor lingkungan geografis juga memberi pengaruh terhadap kegotong-royongan tersebut, misalnya saja faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk desa. Jadi, menurut Bintarto, persamaan nasib dan pengalaman hidup akan menimbulkan hubungan sosial yang akrab, yang mana ini kemudian akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat desa.

Kesimpulan

Kesejahteraan keluarga dipersepsi oleh masyarakat petani miskin lokal dengan tercukupinya kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Hidup tenteram, rahayu dan slamet, merupakan hal utama yang berkaitan dengan ketenangan batin, demikian pendapat masyarakat petani miskin lokal. Keluarga Jawa merupakan suatu ikatan perkawinan yang diakui dalam masyarakat, di mana anggotanya (ayah, ibu dan keturunannya) saling berhubungan akrab, memiliki kedudukan dan melakukan peranannya sesuai nilai-nilai budaya masyarakatnya. Keluarga mengemban tugas pengasuhan (sosialisasi) nilai-nilai kesejahteraan dan berupaya mencapai kesejahteraan hidup keluarganya. Kesejahteraan bagi masyarakat Jawa, merupakan kondisi lahiriah yang ingin dicapai oleh seseorang atau keluarga berdasarkan apa yang dianggap paling berharga dalam hidup orang Jawa, yaitu drajat (kedudukan), harta benda dan

kepandaian. Namun demikian, upaya untuk mencapai kondisi lahiriah tersebut harus berdasarkan nilai-nilai budaya Jawa, sehingga menghasilkan kebahagiaan hati, yaitu rahayu (secara fisik sehat), slamet (rasa aman) dan tenteram.

Fenomena kesejahteraan keluarga merupakan realitas sosio-budaya yang penuh dengan simbol dan makna, serta menyangkut perilaku terpola dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu

untuk mengkaji kembali pendekatan dalam mengembangkan konsep kesejahteraan keluarga. Selama ini, pendekatan makro obyektif, perumusan dan ukuran yang dibangun dari atas (*top-down*) masih dominan digunakan dalam konsep kesejahteraan keluarga. Pendekatan mikro subyektif, diperlukan untuk dapat memahami konsepsi kesejahteraan keluarga menurut pandangan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Achir, Yaumil C., "Pembangunan Keluarga Sejahtera Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa", *Prisma*, No. 6 (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Bintarto, *Buku Penuntun Geografi Desa* (Yogyakarta: UP Spring, 1977).
- Geertz, Hildred., *Keluarga Jawa* (Jakarta: Grafiti Press, 1985).
- Kayam, Umar, "Keselarasan dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal", dalam Nt J. Colleta dan Umar Kayam (penyunting). *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Cetakan kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Soetjipto, *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: Satya Wacana, 1992).
- Sumarti, Titik., "Penguatan Aspirasi Budaya Lokal sebagai Landasan Membangun Keluarga Sejahtera di Pedesaan", dalam *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No. 04/2000.
- Suseno, Franz Magnis., *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Tjiptoherijanto, Prijono., "Penghapusan Kemiskinan Melalui Prokesra (Program Keluarga Sejahtera)", makalah yang disampaikan dalam diskusi *Pertemuan Pra Seminar HDI*, yang diselenggarakan oleh BKKBN (Jakarta, tanggal 30 Juli 1997).
- Trenholm, Sarah., *Thinking Through Communication: An Introduction to the Study of Human Communication* (Boston: Allyn and Bacon, 1995).

Lampiran:

Tabel 1 : Persepsi mengenai Kesejahteraan Keluarga

Persepsi Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
- Hidup rukun dan sehat jasmani-rokhani	9	36
- Hidup rukun dan tercukupinya kebutuhan lahir-batin	9	36
- Tercukupinya kebutuhan lahir-batin serta perlu pendidikan tinggi	7	28
J u m l a h	25	100

Sumber : Data Kuesioner

Tabel 2 : Persepsi mengenai Kesejahteraan Keluarga Menurut Pandangan Budaya Jawa

Persepsi Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
- Menerima apa adanya dan tidak serakah	10	40
- Menerima apa adanya dan tidak "ngaya" dalam bekerja	6	24
- Slamet dan rukun	9	36
J u m l a h	25	100

Sumber : Data Kuesioner

Tabel 3 : Matriks Komponen Indikator Kesejahteraan Keluarga

Kondisi Ukuran / Ciri	Indikator Kesejahteraan Keluarga
- Drajat : Pekerjaan	Lapisan Bawah : - petani - pedagang
- Harta benda : Papan	- Rumah yang memenuhi syarat kesehatan - Mempunyai tanah garapan
- Pendidikan	- Dapat menyekolahkan anak minimal tamat SMTA/12 tahun - Sekolah penting supaya dapat menjadi pegawai negeri
- Rahayu	- Sehat, tidak terserang penyakit - Anggota keluarga (anak) sakit langsung berobat ke Puskesmas
- Slamet	- Rukun - Gotong royong - Mempunyai tabungan - Terpenuhi kebutuhan batiniah
- Tenteram	- Hubungan berkeluarga dan bertetangga baik - Membangun keagamaan - Bersyukur (menerima apa adanya)